KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:9205-8208-7185-0100

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099671/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(03)	Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi	:	(20)	SULAWESI TENGGARA
4. Kode/Nama Satker	:	(099671)	PENGADILAN NEGERI RAHA
Sebesar	:	Rp. 155.462.000	(SERATUS LIMA PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04	PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	155.462.000
005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	155.462.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	155.462.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN R A H A	(157)	Rp.	155.462.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:9205-8208-7185-0100

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode/Nama Satker : (099671) PENGADILAN NEGERI RAHA

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				155.462.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				155.462.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum				
		2. 01	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum				
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
		5. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi		2,00	kegiatan	1.500.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum		2.00	kegiatan	1.500.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		192,00	Perkara, Berkas Perkara	117.962.000
Rincian Output	:	01 BCA.U08	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah		192.00	Perkara	117.962.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		87,00	Orang	36.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	(PN)	87.00	Orang	36.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2025

DS:9205-8208-7185-0100

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode/Nama Satker : (099671) PENGADILAN NEGERI RAHA

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	155.462.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	155.462.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:9205-8208-7185-0100

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode/Nama Satker : (099671) PENGADILAN NEGERI RAHA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099671	**PENGADILAN NEGERI RAHA**	**-**	**155.462**	**-**	**-**	**-**	**155.462**		
005.03.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**155.462**	**-**	**-**	**-**	**155.462**		
1049	**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**	**-**	**155.462**	**-**	**-**	**-**	**155.462**		
1049.AEA	Koordinasi (20.03 SULAWESI TENGGARA / KAB. MUNA)	-	1.500	-	-	-	1.500	20 . 03	
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500	157@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (20.03 SULAWESI TENGGARA / KAB. MUNA)	-	117.962	-	-	-	117.962	20 . 03	
01	RM	-	117.962	-	-	-	117.962	157@	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (20.03 SULAWESI TENGGARA / KAB. MUNA)	-	36.000	-	-	-	36.000	20 . 03	
01	RM	-	36.000	-	-	-	36.000	157	
	JUMLAH	**-**	**155.462**	**-**	**-**	**-**	**155.462**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:9205-8208-7185-0100

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode/Nama Satker : (099671) PENGADILAN NEGERI RAHA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**099671**	**PENGADILAN NEGERI RAHA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	13.056	155.462
		BELANJA BARANG	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	13.056	155.462
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	13.056	155.462
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	12.946	13.056	155.462
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.658	19.467
		- PNBP (425231)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
		- PNBP (425232)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	55	550
		- PNBP (425233)	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	198	2.255
		- PNBP (425239)	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.395	16.652

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2025
IV A. B L O K I R

DS:9205-8208-7185-0100

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [099671] PENGADILAN NEGERI RAHA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
099671	**PENGADILAN NEGERI RAHA**				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	24.375		
	52 Belanja Barang	Rp.	24.375		
005.03.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**				
1049	**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**				
1049.AEA	**Koordinasi**				
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	750		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
1049.BCA	**Perkara Hukum Perseorangan**				
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	23.625		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2025
IV B. C A T A T A N

DS:9205-8208-7185-0100

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [099671] PENGADILAN NEGERI RAHA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002